

BAB II

SEJARAH POLITIK IRAN DAN LATARBELAKANG SISTEM PEMERINTAHAN

WILAYATUL FAQIH

A. Sejarah Iran Modren

Negara Republik Islam Iran merupakan negara yang secara geografis termasuk di kawasan Timur Tengah. Iran ialah negara yang telah melalui sejarah yang panjang. Dari abad ke-6, Iran yang dulunya di kenal dengan nama Persia yang menjadi salah satu negara terbesar di dunia setelah Romawi. Selain itu pula Iran berhasil mendirikan suatu peradaban sehingga diakui menjadi salah satu bangsa yang paling mengalami perubahan dalam sejarah. Iran termasuk bangsa yang diperhitungkan dalam situasi perpolitikan dunia.¹

Sejarah Iran Modren berawal dari hadirnya sistem Dinasti Qajar. Qajar mendapat mahkota kekuasaannya setelah melalui periode anarkis dan pergolakan kesukuan unruk memperebutkan kekuasaan atas Iran. Aturan mereka tidak pernah terkonsolidasikan. Dinasti Qajar menguasai Iran sejak tahun 1779 sampai 1925 menyamai pemerintahan sebelumnya, dimana itu merupakan rezim memusat yang lemah karena berhadapan dengan faktor-faktor kesukuan popisional yang kuat dan merupakan rezim dimana independensi keagamaan yang sangat tinggi.²

Pemerintahan pusat Dinasti Qajar ialah pemerintahan istana yang sangat lemah untuk mengembangkan secara efektif sistem perpajakan di Iran. Selain itu kekuasaan tokoh-tokoh agama semakin meluas. Pada abad-18 hingga abad-19, jumlah ulama Iran mencapai tingkat independensi yang sulit untuk tidak dikalahkan oleh masa-masa sebelumnya, yaitu kepemimpinan yang kuat.

¹ Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, *Sejarah Politik Reuplik Islam Iran Tahun 1905-1979*, (vol.3, No.2 juli-desember 2020) h.146

²Ira.M Lapidus, *Sosisal Sejarah Umat Islam*, Bagian 3, terj. Ghufron A. Masadi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 31-33

Kekuatan keagamaan ulama di tandai sebagai *mujtahid* atau penafsiran hukum-hukum agama (*syari'at*) dikenalkan secara meluas supaya mereka memiliki hak untuk mengambil suatu keputusan secara mandiri dan menerjemaahkan permasalahan agama menurut pencapaian kebatinan dan intelektual mereka.³

Pendapat Eropa yang sangat penting merupakan memodifikasi kedudukan rezim Qajar dan menambah ketakutan yang tidak tampak antara penguasa dan ulama. Dengan adanya campur tangan Eropa terhadap Iran pertama kali dalam menaklukkan dan mempengaruhi mereka melalui persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa. Hal tersebut membuat Qajar untuk membuat perubahan dan memperkuat susunan kenegaraan dan membuat perubahan terhadap pendidikan dengan membangun suatu perguruan tinggi teknik yang diberi nama *Dar Al-Fan'un*, dan menyusun kembali pasukan kavaleri dengan membentuk "*Brigade Cossack*" pasukan militer yang dilatih dan dipilih secara khusus oleh penasihat Rusia dan Australia.

Perubahan tersebut menimbulkan lapisan baru tokoh modernis islam dan cendekiawan barat yang condong kepada modernisasi Iran sebagai satu-satunya cara yang efektif melawan kekuatan asing dan agar dapat merubah kondisi sebageian masyarakatnya. Hal tersebut dapat memicu perlawanan dari para cendekiawan dan para ulama dari pengaruh asing dalam pemerintahan.

Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Qajar, yaitu:

Pertama, Keluarnya Gerakan Tembakau pada tahun 1891-1892, di bawah pimpinan Marja besar Ayyatullah Al-Usma Mirza Hasan Sirasi. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengilangkan masuknya dunia barat yang menyebabkan ikut campurnya mereka ke dalam urusan internal negara Iran.

³Jhon L. Esposito (ed) Ensiklopedia Oxford *Dunia Islam Modren jilid 1*, terj. Eva YN, dkk (Bandung: Penerbit Mizan) h.330.

Kedua, Perubahan konstitusi Iran. Kejadian yang terjadi tahun 1905-1906 berhasil mengahiri kekuasaan absolut raja. Hal itu disebabkan oleh adanya protes dari pedagang dan para ulama terhadap pengaruh Barat. Timbulnya tuntutan atas di ubahnya tradisional dan fragmentasi dikalangan penguasa Qajar itu sendiri.⁴

Perubahan konstirutional itu merupakan hasil dari suatu persatuan antara pedagang Bazaar, ulama, intelektual, pemilik tanah serta sejumlah kepala suku. Setelah itu mereka memiliki gabungan di dalam sebuah badan yang telah dibentuk pasca terjadinya perubahan ini, dan ikut serta dalam melaksanakan roda pemerintahan bersama raja.⁵ Keadaan konstitusional tahun 1905-1911 menyebabkan penyatuan aspek-aspek fundamental masyarakat Islam Iran dan membangkitkan kekuatan gerakan nasionalisme awal dan perlawanan terhadap orang asing tetapi Iran, seperti kebanyakan negara muslim yang masih terpengaruh imperialisme Barat. Peninggalan dan dampak kemunculan serta pengaruh asing di Iran menimbulkan minim kekuasaan, minim keabsolutan dan minim kepedulian antara sesama yang terlihat makin parah saat pemerintahan Dinasti Pahlevi.

Ketiga, terjadinya sejumlah pemberontakan-pemberontakan lokal yang diakibatkan oleh tekanan yang terus menerus dari para gubernur lokal, para intelektual modren, dan ulama, dinasti diambang keruntuhan, Iran hampir terpisah dibuat oleh Rusia dan Inggris dalam keadaan ini pada tahun 1921 pemimpin Brigade Cossack, Reza Syah Pahlevi berhasil melakukan kudeta melengserkan kekuasaan raja terakhir Dinasti Qajar.⁶

Dari ketiga peristiwa itu merupakan faktor Intern yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan Dinasti Qajar. Terdapat sejumlah faktor eksternal seperti pecahnya perang dunia pertama, menguatnya pengaruh Inggris di Iran setelah revolusi Oktober di Rusia, dan menyebabkan

⁴ Riza Sihbudi, *Revolusi Iran, Sebuah Pandangan Sosial Politik* Buku “the state and revolution in iran” karya Hossein Bashiriyah (London&Canberra: Croon Helm, 1984) h.203

⁵ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996) h.5

⁶ Esposito, *Dunia Islam Modren jilid 1*, h.329-337

runtuhnya Dinasti Qajar pada tahun 1925 dan kemudian digantikan dengan Dinasti Pahlevi yang di pimpin oleh Reza Syah Pahlevi.

B. Iran Dan Pembentukan Negara-Negara

Seorang perwira militer merebut kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlevi di akhir tahun 1920-an yang bernama Reza Syah. Pengaruh langkah rekannya saat itu di Turki, Mustafa Kemal (Attaruk) yang memfokuskan perhatiannya pada modernisasi dan pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat mengandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi lembaga-lembaga keagamaan, akan tetapi hanya membatasi dan mengontrol mereka.⁷

Sejak saat itu Iran mengalami proses pembentukan negara-negara bangsa yang serupa dengan proses yang berlangsung di Turki dan sejumlah negara lain. Negara menjadi kunci kemajuan ekonomi serta pertumbuhan kebudayaan menurut model Barat. Tetapi berbeda dengan Turki kalangan menengah menjadi kelas pengampu utama bagi pemerintahan Pahlevi. Selain itu Pahlevi juga memajukan angkatan bersenjata yang baru dan lebih kuat. Banyak ulama yang mendukung untuk mengambil kembali kekuasaan oleh Reza Syah agar memulihkan monarki yang kuat untuk memberantas pengaruh negara asing.⁸

Meskipun Reza Syah menggapai kekuasaan dari dukungan sebagian ulama yang menginginkan perbaikan, tetapi Syah membuat suatu kebijakan yang ahlinya membuat hubungannya dengan para ulama memburuk terutama saat Syah ingin membatasi kekuasaan para ulama. Syah bersikeras ingin mewujudkan tujuannya melalui peningkatan pendidikan sekuler,

⁷ Eposito, *Demokrasi*, h. 68-69

⁸ Meuleman, Johan Hendrik, *Dinamika Abad ke-20*, (Jakarta : PT Ichthiar Baru van Hoeve, 2005), h.30

pengamatan pendidikan keagamaan, pemisahan wewenang syariat dan pengadilan agama dengan mengeluarkan sejumlah undang-undang baru dan memperkuat pengadilan negeri.⁹

Perang Dunia ke-II pun berakhir, Rusia dan Inggris ikut lagi mencampuri urusan pemerintahan Iran demi kepentingan sendiri. Mereka mendesak mengganti Syah dan menggantikannya dengan putranya yang belum dewasa Muhammad Reza Pahlevi sekitar tahun 1941 dia pun dijadikan sebagai boneka penguasa di Iran. Diantara tahun 1941-1953 Iran menjalani periode pergolakan yang terbuka antara sejumlah protektor asing dan sejumlah partai Politik internal. Lambat laun Amerika Serikat menyingkirkan pengaruh Inggris dan Rusia dan pada akhirnya menjadi perlindungan utama Iran setelah perang. Salah satu alasan utama dari ikut campur Amerika Serikat terhadap Iran ialah kekhawatirannya bahwa Iran akan memperkuat pengaruh Uni Soviet dan komunisme di Iran. Atas penyelesaian tersebut menimbulkan rezim yang otoriter dan terpusat.

Menurut pendapat Hossien Bashiriyeh, ada lima landasan kekuasaan yang dibangun oleh Syah yang kemudian menimbulkan revolusi dan menyebabkan jatuhnya Syah. *Petama* kontrol negara sangat besar atas sumber-sumber keuangan, khususnya minyak; *Kedua*, program stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta intervensi ekonomi rezim ke dalam sistem ekonomi; *Ketiga*, mobilitas massa dan penciptaan suatu keseimbangan antara kelas-kelas melalui kontrol dan intervensi rezim; *Keempat*, pembentukan hubungan-hubungan *patron-client* dengan kaum borjuis kelas atas; *Kelima*, diperluasnya peran kekuatan penekanan (SAVAK) terhadap ketergantungan pada Barat terutama dukungan politik Militer AS.¹⁰

⁹ Ibid, h. 30

¹⁰ Hossein Bashiriyah, " *the state and Revolution in Iran 1968-1982*" (London and Canberra: Croom Helm, 1984), h.201

C. Revolusi Islam Iran

Pada akhir periode tahun 70-an, dunia kembali dikejutkan dengan peristiwa revolusi Islam yang terjadi di Iran. Revolusi yang dilihat oleh beberapa pengamat Barat, salah satunya yaitu Jhon L Esposito Ia disebut salah satu pemberontak rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia berhasil menyingkirkan rezim otoriter yang dipimpin oleh Reza Pahlevi. Revolusi tersebut merupakan salah satu hasil dari proses akumulasi ketidakpuasan rakyat Iran terhadap kebijaksanaan Syah, baik itu dibidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya. Banyak keberhasilan yang dicapai dari revolusi yang ditentukan dari dua faktor yang saling berkaitan. Terciptanya persatuan diantara kelompok-kelompok penentang Syah ada disatu pihak, baik yang berpegang pada keyakinan nasionalisme, islamisme (organisasi yang dibentuk oleh kaum mullah). Di sisi lain muncul kelompok ulama seperti Ayyatullah Murthadha Munthahari, Ayyatullah Khomeini disebut sebagai lambang pemersatu, serta tokoh intelektual awam seperti Ali Syari'ati yang dikenal sebagai konseptor akar ideologi revolusi, Mehdi Bargazan, beserta tokoh lainnya.

Revolusi Islam Iran ini mewujudkan bentuk yang khas antara negara Iran dan Institusi Islam, justru revolusi ini merupakan suatu peristiwa terbesar dalam sejarah masyarakat Iran. Revolusi tersebut mencatat puncak pergolakan politik antara pemerintah Iran dan kelompok-kelompok ulama yang sudah berlangsung lama, akibatnya terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Iran yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Iran sekarang.¹¹

Dari garis besar terdapat empat persoalan yang melatarbelakangi revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini;

1. Intervensi Negara-Negara Barat

¹¹ Hossein Bashiriyah, " *the state and Revolussion in Iran*, h. 201

Pada saat Syah Reza Amerika Serikat (AS) memimpin menjadi satu-satunya negara yang bisa mengintervensi kebijakan pemerintah Iran dan menjadikan negara Iran sebagai boneka di Timur Tengah.

2. Program Modernisasi pembangunan Ekonomi

Dalam masa melaksanakan modernisasi Syah Reza mengutamakan dua bidang yaitu industri dan pertanian. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dan berkembang dengan lancar.

3. Tindakan Otokratik Refresif Rezim Syah

Saat memperluas dan menguatkan kekuasaannya, Syah Iran menggantungkan kekuasaannya pada kekayaan yang didapat dari sumber minyak Iran dan penipuan pembangunan serta penguatan angkatan bersenjata dan membentuk polisi (SAVAK).

4. Westernisasi

Moderenisasi dimaksud oleh Syah di berlakukannya hampir di setiap negara maju serta membawa dampak menghidupkan dan memajukan elit politik dan kultural, moderenisasi datang ke Iran dalam bentuk westernisasi, dan proses modernisasi yang berbagai macam secara intere menunjukkan kecenderungan di Iran.¹²

Para ulama yang mendominasi yang dipilih untuk membuat rancangan konstitusi, masih meninggalkan krisis Iran yang tercermin dalam perdebatan konstitusional mengenai hakikat kepemimpinan negara. Perdebatan yang terjadi tidak hanya antara pihak yang lebih menginginkan pemerintahan sekuler daripada pemerintahan islami, tetapi ada juga diantara pihak lain yang menginginkan pemerintahan islam tetapi menolak asas *Wilayatul Faqih* dari Imam Khomeini yang menjadikannya sebagai seorang ahli otoritas tertinggi.

¹² Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 104-107

Revolusi Islam Iran merupakan kejadian yang secara figuratif sangat penting. Revolusi Iran menunjukkan bahwa rezim sekuler yang dipengaruhi oleh Barat dapat runtuhkan dengan kekuatan oposisi organisasi oleh para pemburu islam. Sebab kaum revival menyuarakan perubahan sejak ahir abad ke-19, dengan sukses revolusi Iran mampu memberikan daya tarik perjuangan mereka dan memicu munculnya aktivitas fundamentalis di dunia islam.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan rakyat Iran dalam menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi.

Pertama, bersatunya elemen masyarakat hingga mampu menimbulkan sebuah gerakan masal. Sebagai elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah, terutama karena ideologi, revolusi dan kontra revolusi mereka bersatu karena adanya tujuan yaitu menumbangkan rezim Shah Reza Pahlevi.¹³

Kedua, ketidaksenangan yang menimpa hampir seluruh lapisan masyarakat terhadap kebijakan dalam pemerintahan Shah Reza Pahlevi yang tidak membela rakyat terkhusus rakyat miskin. Hasil dari pembangunan terutam di bidang ekonomi di nikmati kalangan pejabat sehingga terjadi masalah ekonomi yang sangat parah. Ketidakpuasan rakyat akhirnya menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledakan rezim yang berkuasa.

Ketiga, faktor keberhasilan dalam menumbangkan rezim Shah Reza Pahlevi merupakan faktor kepemimpinan. Saat itu kemunculan Khomeini dipandang sebagai figur yang tepat untuk memimpin revolusi dan juga pemimpin Syi'ah yang terkemuka. Ia juga memiliki pengaruh besar dibidang agama, politik dan sosial, oleh karena itu dengan karisma dan pengaruh kuat yang di miliki Ayyatullah Khomeini lebih mudah mengarahkan massa.

¹³ Budi Sujati, Setia Gumilar, *Paul Thomsom : The Voice of the Past. Suara dari Masa silam:Teori dan Metode Sejarah Lisan*, (UIN Sumatera Utara, Jurna JUSPI : Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol 2 No.2 tahun 2018), h.143

Keempat, mogoknya pekerjaan pegawai negeri dan buruh berhasil melumpuhkan perekonomian sehingga pemerintah terancam bangkrut. Pemogokan juga merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk mendesak Shah Reza Pahlevi mundur dari kekuasaannya. Apalagi para buruh minyak berhasil membalikkan kondisi negara Iran yang semula eksportir menjadi importir minyak. Akibatnya pendapatan minyak turun drastis sehingga proyek pembangunan yang sumber dananya sebagian besar dari minyak menjadi terbengkalai.

Bisa disebutkan bahwa meskipun kegawatan dinamis bagi oposisi terhadap monarki telah sejak lama ada di Iran, tapi tidak seorang pun Muslim dapat meramalkan dengan pasti bahwa hasil akhir dari revolusi berupa pemerintahan teokratis. Pada kaum muslim yang menginginkan pembaruan dan ingin lepas dari kekuasaan Barat, revolusi islam Iran merupakan kejadian yang sangat memberikan Ilham. Untuk kaum nasionalistik sekuler dan sebagian orang Barat revolusi ini terlalu mengusik. Akan tetapi, selama periode ini Ayyatullah Khomeini sangat menonjol karena perannya dalam memimpin revolusi Iran inilah Khomeini diangkat menjadi sebagai pemimpin revolusi Islam Iran sebagaimana yang di sahkan dalam konstitusi Iran pada desember 1979.¹⁴

Dilihat kembali hal yang menarik dari revolusi Islam Iran ialah betapa rapuhnya rezim Syah Reza Pahlepi yang penuh dengan tekanan. Memasuki tahun 1970-an para polisi rahasia sangat ditakuti dan dikenal banayak bertindak secara brutal serta efektif serupa dengan lembaga-lembaga ciptaan rezim komunis di Eropa Timur. Tapi setelah gerakan oposisi sekular dan gerakan keagamaan bersatu dibawah kepemimpinan Ayyatullah Khomeini yang sebelumnya mengasingkan diri ke Prancis.

¹⁴ Budi Sujati, *Jurna JUSPI : Jurnal Sejarah* , h. 144

Pada tahun 1979 Shah melarikan diri dari Iran. Di Iran islam telah menampilkan perannya sebagai pemersatu masyarakat yang sedang dalam perpecahan. Iran benar-benar sangat unik diantara masyarakat muslim lainnya dalam hal kekuasaan yang mengendalikan kegiatan keagamaan dalam hal kekuasaan dan menyerap kecenderungan yang berkembang dalam spektrum umat islam .¹⁵

D. Latar Belakang Pemikiran Wilayatul Faqih

Konsep *wilayatul faqih* adalah pokok dari pemikiran Syi'ah kontemporer yang menjadikan sistem politik berlandaskan agama. Konsep tersebut timbul dari ajaran *Imamah* (kepemimpinan) yang merupakan asas paham Syi'ah.

Dalam bahasa arab, kata '*wilayah*' berarti pemerintahan yang berasal dari kata '*wali*' yang secara terminologi menurut kalangan leksiograf arab terkemuka merupakan unit terkecil yang berarti dalam bahasa mengandung makna tunggal. Di dalam bahasa arab ada tiga arti kata *wali*; 1. Teman, 2. Setia/berbakti, 3. Pendukung/ penyokong. Di samping ketiga arti tersebut, dua arti disebutkan untuk kata '*wilayah*' dalam kamus bahasa Indonesia yaitu 1. Kekuasaan dan penguasaan ,dan dalam kamus bahasa Arab yaitu 2. Pemerintahan dan kepemimpinan.¹⁶

Dalam terminologi Syi'ah kata *wilayah* ini jadi kunci perumusan politik islam, menunjukkan kepemimpinan umum. Dalam Mazhab Syiah berarti menerima perwalian kepemimpinan dan pemerintahan oleh wali setelah wafatnya Nabi, karena Ali merupakan contoh yang baik dengan pengabdianya kepada Allah. Sedangkan kata *Faqih* secara terminologi berasal dari bahasa Arab

¹⁵ Dudung Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam : Dari Klasik hingga Modren*, (Yogyakarta : LESFI, 2002), H.295.

¹⁶ Mehdi Mahdavi Teherani, *Negara Ilahiyah: Suara Tuhan, Suara Rakyat*, (Jakarta: Al- Huda, 2005), h.38

yang berarti seorang yang baik pengetahuannya atau suatu pengakuan yang tulus diikuti dengan tindakannya.¹⁷ Oleh sebab itu pengetahuan *wilayatul faqih* secara sederhana merupakan suatu sistem pemerintahan yang kepemimpinannya di bawah seorang Faqih (Imam) yang adil dan berdaulat dalam menangani urusan agama dan dunia atas seluruh kaum Muslimin di Negeri Islam yang berasal dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah dan umat manusia serta alam semesta.

Menurut pandangan Anshari Wilayat berarti kekuasaan penuh ditangan wali untuk melaksanakan dengan bebas urusan-urusan umat Muslim, tetapi menurut Anshari sebagai seorang Faqih yang bertumpu pada hadist-hadist yang mengerakkan posisi ulama, telah memperkirakan bahwa hadist ini memang untuk para Faqih.¹⁸ Di antara hadist-hadist tersebut yaitu;

a. Ulama ialah pewaris para Nabi

Menurut penafsiran mereka makna Wilayat merupakan kekuasaan penuh ditangan seorang Wali, hadist ini menunjukkan bahwasanya ulama ialah pewaris para Nabi, bukan saja dalam ilmu tetapi juga dalam otoritas sebagai wali umat.

Dari pendapat lain menyatakan bahwa maksud dari hadits tersebut, dari menyampaikan mengenai kemuliaan ilmu keagamaan dan mendorong mereka untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu hadist ini ada hubungannya dengan wilayat para faqih. Dengan kata lain ulama sebagai pewaris para Nabi karena mereka mempunyai ilmu keagamaan, bukan karena mereka mewarisi hak untuk mengemban otoritas para Nabi sebagai wali yang ditunjuk oleh Allah.

b. Ulama ialah orang kepercayaan Nabi

¹⁷ Joesef Sou'yb, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syiah* (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000), h.32.

¹⁸ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syiah* (Bandung; Mizan, 1998), h. 342

Hadist ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa Ulama ialah orang kepercayaan Nabi selama dia tidak masuk kedalam dunia.

Dari hadist tersebut mereka yang mendukung *Wilayatul Faqih*, hadist tersebut menjelaskan bahwa ulama lebih unggul dari pada Nabi Bani Israil, sebagai seorang ulama yang adil dalam muka bumi. Tetapi disisi lain ulama ada yang berpendapat perbedaan antara seorang faqih seorang Nabi, tingginya posisi seorang faqih membuat kemungkinan bagi faqih untuk masuk kedunia dan menjadi orang yang berdosa, hal tersebut tidak seperti terjadi pada diri seorang Nabi yang harus di taati semua yang diajarkan.

Sejarah *Wilayatul Faqih* bukanlah hal yang baru di susunan politik Syiah, sebelumnya *Wilayatul Faqih* sudah pernah dibahas oleh tokoh-tokoh Syiah klasik seperti Syekh Muhammad Thusi, Sayyid Murthada, Bahrul Ulum. Tetapi *Wilayatul Faqih* baru dipopulerkan bahkan secara praktis baru berhasil dilaksanakan oleh Khomeini pada tahun 1979.

Revolusi islam Iran yang terjadi di akhir periode 70-an, berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki absolut yang dikuasai oleh Dinasti Pahlevi. Revolusi Islam Iran telah melahirkan paradigma baru mengenai sistem pemerintahan di Iran. Sistem politik dan bentuk negara Iran berubah dari yang awalnya monarki Absolut menjadi sebuah republik Islam. Perbedaan yang paling tampak diantara keduanya ialah, jika sebelumnya revolusi Iran merupakan sebuah negara sekuler, maka setelah revolusi Iran bisa dikatakan sebagai sebuah negara demokratis yang didominasi kaum *Mullah* (Ulama Syi'ah). Inilah yang melatarbelakangi munculnya sistem Pemerintahan Republik Islam Iran dalam bentuk *Wilayatul Faqih*.¹⁹

¹⁹ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan...* h. 343

Munculnya konsep *Wilayatul Faqih* yang di populerkan oleh Khomeini yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan kedaulatan Ilahi setelah berakhirnya masa *Imamah* (kepemimpinan) dan yang dilatarbelakangi empat pemikiran :

Petama, Berakhirnya masa *Imamah*, dari pengertian yang disebut masa “*kegaiban besar/sempurna*”, ialah masa sesudah meninggalnya keempat Wakil Imam sampai kedatangan kembali Al-Mahdi pada ahir Zaman. Keempat wakil Imam tersebut ialah Ali bin Musa, Muhammad bin Ali (yang lebih dikenal sebagai *Muhammad Al-Jawad*), Ali bin Muhammad, dan Hasan bin Ali. Setelah berakhirnya masa setelah perwalian Imam yang biasa disebut dengan perwalian umum inilah kepemimpinan yang dilanjutkan oleh para Faqih. Karena peran dan fungsi para Faqih merupakan melanjutkan tugas-tugas keimanan yang senantiasa dibutuhkan umat.²⁰

Kedua, Susunan dari konsep *Wilayatul Faqih* yang dimaksud sebagai upaya mengisi kefakuaman *Imamah* sekaligus menjaga kelestariannya. Dari tampilan para Faqih yang mengemban fungsi teologis-politisi sebagaimana pendahulunya, sekaligus menempatkan mereka sebagai *Sultan Al-Zaman Li-tadbir al-anam* (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola urusan-urusan umat manusia), dan bisa juga diartikan sebagai kreativitas Khomeini, penggagas konsep *Wilayatul Faqih* tersebut.

Ketiga, Idealisasi politik Syiah yang ada pada dalam diri Khomeini mengartikan bila pada abad-abad sebelumnya Islam Syiah belum berhasil mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam dibawah pemerintahan Imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan tirani yang Zhalim, oleh sebab itu pada abad-20 cita-citanya terlaksanakan melalui perjalanan panjang seorang wakil Imam yaitu Khomeini.²¹

²⁰ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syi'ah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang UIN Maliki Press, 2011) h.107.

²¹ Ibid, h. 109

Gagasan *Wilayatul Faqih* ini pernah muncul dilingkungan Syiah, pada abad ke-12. Tetapi karena watak dan ruang lingkungannya yang masih terbatas pada masalah-masalah keagamaan, maka gagasan tersebut hilang begitu saja dan seolah-olah tidak pernah ada. Upaya mewujudkan idealisasi politik Syiah yang telah diubah khomeini dalam konsepnya tentang otoritas para Faqih diwilayah Iran, semakin mantap karena Mazhab Syiah Imamiah Itsna Asyariyah telah berakar kuat diwilayah Persia ini jauh sebelum revolusi Islam 1979, tepatnya sekitaran abad ke-7 M, saat itu ketika Imam Husain Ibn Ali (Imam ketiga) menikahi salah seorang putri Raja Persia , Khosru Yazdajird.²²

Keempat, konsep *Wilayatul Faqih* yang semakin didesak memberlakukannya karena banyaknya anomali kekuasaan yang dilakukan oleh Syah-Reza Pahlevi , di bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun politik sebagai akses dari ambisi Syah Iran untuk memproses modernisasi negaranya, yang berakibat pula pada proses De-islamisasi, terutama dibidang sosial-budaya yang di praktikkan Syah adalah sekulerisasi.

Kebijakan Syah yang ingin mengurangi pengaruh agama islam yang sudah berakar kuat dikalangan rakyat Iran. Demikian pula dalam bidang politik, terutama dikalangan umat Mullah dan agama Islam, segala yang dilakukan Syah sangat kejam dan represif. Kelihatannya yang ia inginkan tidak sekedar upaya memisahkan Mullah dan umatnya tetapi juga membatasi gerakan para imam dan menangkapnya seperti yang ia lakukan kepada Khomeini pada tahun 1963.²³

Dengan lahirnya *Konsep Wilayatul Faqih* yang dilatarbelakangi oleh persoalan ideologi politis yang disebabkan oleh persoalan sosial-budaya dan ekonomi yang terakumulasi menjadi satu. Di saat kegagalan dan pergumulan politik terdapat figur Khomeini yang Kharismatis dan cerdas terhadap persoalan umatnya, sehingga ia berhasil mengakomodir berbagai persoalan

²²Ibid, h. 110

²³ Ibid, h. 122

kedalam satu titik, yang mempraktikkan lembaga Imamah yang dimodifikasi yang disebut *Wilayatul Faqih*.

Wilayatul Faqih muncul dari kelanjutan kata Imamah sebab fungsi-fungsi utamanya ialah melaksanakan pemerintahan Imam. Konsep tersebut menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah. Yang bersandar pada seorang Faqih yang adil dan kapabel untuk memegang pemimpin pemerintahan selama gaibnya imam yang maksum. Perkembangan *Wilayatul Faqih* ini pertama berkembang di negara Iran dan Irak dengan komunitas Syiah Imamiyah, Khususnya dikawasan perkotaan dan dinegara para pengrajin.²⁴

Politik Syiah muncul dari konsep kepemimpinan Imamiyah selama peridode ghaib besar dimana Imam yang kedua belas dalam keadaan ghaib. Pengetahuan akan hukum dan keadilan merupakan dua syarat yang mendasar dalam permasalahan imamah. Konsep politik Syiah yang terpusat pada Imam yang setelah itu diterjemahkan menjadi *Wilayatul Faqih* dalam periode modren dalam bentuk negara Iran. Iran menjadi memeluk konsep politik syiah setelah evolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Khomeini.

Ada beberapa wewenang seorang Faqih antara lain;

1. Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran,
2. Mengangkat dan memberhentikan seluruh pimpinan Angkatan Bersenjata Iran,
3. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan Pengawal Revolusi,
4. Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi Iran,

²⁴ Khomeini, *Pemerintahan Islam*, h. 45

5. Membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggota-anggotanya terdiri atas Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasehat yang diangkat oleh Faqih.²⁵

Pemegang kekuasaan tertinggi kedua ialah presiden yang dipilih setiap empat tahun sekali. Tugas-tugas pokoknya antara lain menjalankan konstitusi negara menjadi kepala pemerintahan serta mengkoordinasi ketiga lembaga negara yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Presiden merupakan pejabat tertinggi pemerintahan Iran dengan hubungan dunia Internasional. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Parlemen yang beranggotakan 270 orang, yang dipilih secara bebas dan rahasia oleh rakyat.

Didalam perlemen terdapat suatu badan yang disebut Dewan Pelindung, Konstitusi Iran yang beranggotakan duabelas orang, enam orang diataranya adalah para ahli hukum islam (*Fuqaha*) yang diangkat oleh Faqih. Sedangkan enam orang lainnya dari ahli Hukum umum yang ditawarkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui oleh Parlemen. Oleh sebab itu konsep *Wilayatul Faqih* ini merupakan konsep yang telah lama ada yang berkembang dengan seiringnya waktu. Hingga saat ini ketika konsep tersebut telah direalisasikan dalam Konstitusi Republik Islam Iran oleh Imam Khomeini.²⁶

²⁵ Joesoef Sou'yb, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syiah* (Jakarta;Pustaka Assunnah, 2000). H. 214.

²⁶ Ibid, h.215